

Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bungo

Pebrian Rahmad Ramadhan*; Etik Umiyati; Erni Achmad

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

**E-mail korespondensi: Pebrian_ramadhan@yahoo.co.id*

Abstract

This study aims to: 1) analyze and describe the development of PAD, Balanced Fund, GRDP, population, HDI, and Regional Expenditure of Bungo Regency during 2004-2019. 2) To analyze the effect of PAD, Balanced Fund, GRDP, population, and HDI on Regional Expenditure of Bungo Regency during 2004-2019. The data used in this research is secondary data. The model used in this study is a multiple linear regression model. The results showed that partially the population, balance funds, population, and HDI had a significant effect on Regional Expenditures in Bungo Regency during 2004-2019, while PAD had no considerable effect on Regional Expenditures in Bungo Regency during 2004-2019 with a significant value of $P < 0.05$. The R^2 value in this study was 0.987391. This shows that 98.7391% of regional expenditure in the Bungi Regency is influenced by the population, PAD, balancing funds, GRDP, and IPM. Meanwhile, 1.2609% were influenced by other factors that were not observed in this study.

Keywords : Total population, PAD, Balancing fund, PDRB, IPM, Regional expenditure

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perkembangan PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk, IPM dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019. 2) Untuk menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk, dana perimbangan, jumlah penduduk dan IPM berpengaruh secara nyata terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019, sedangkan PAD berpengaruh tidak nyata terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dengan nilai signifikan $P < 0,05$. Nilai R^2 dalam penelitian ini sebesar 0,987391. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,7391% belanja daerah di Kabupaten Bungi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM. Sedangkan 1,2609% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di amati dalam penelitian ini.

Kata kunci: Jumlah Penduduk, PAD, Dana Perimbangan, PDRB, IPM, Belanja daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah sendiri dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (Ferdiansyah dkk, 2018). Melalui undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan disegala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya (Gorahe dkk, 2011). Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2014).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah Daerah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Ningrum, 2018).

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dengan luas wilayah $\pm 4.659 \text{ Km}^2$ yang terbagi menjadi 17 Kecamatan. Menurut Fasholla (2017) sebagai upaya melakukan pembangunan daerah, maka pemerintah Kabupaten tentu harus melakukan belanja daerah secara adil dan merata agar memberikan manfaat yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum.

Alokasi belanja daerah di Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp.1.202.666.153.052,45 dan pertumbuhan sebesar 5,43%. Tahun 2015 jumlah belanja daerah Kabupaten Bungo sebesar Rp.1.094.777.965.819,00 dan terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi Rp.1.337.987.498.000,00. Jumlah belanja daerah Kabupaten Bungo tersebut hanya sebesar 24,99% dari seluruh anggaran belanja daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.813.407.008.965,77. Padahal jika dilihat, potensi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo lebih tinggi dibanding Provinsi Jambi, tetapi belanja daerahnya hanya sedikit dibanding dengan Provinsi. Kondisi keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta kemampuan dalam mengolah sumber-sumber keuangan daerah sangat mempengaruhi alokasi belanja daerah itu sendiri.

Kemampuan belanja daerah Kabupaten Bungo yang terus meningkat diduga karena adanya pengaruh dari beberapa faktor, seperti faktor jumlah penduduk, PAD, PDRB, dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai pendapat Kartika dan Wantara (2015) bahwa kemampuan suatu daerah untuk melakukan belanja daerah dipengaruhi oleh dana perimbangan yang terdiri dari dan alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta pendapatan asli daerah itu sendiri. Selanjutnya menurut Sanusi dan Yusuf (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah PAD, PDRB, Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan IPM.

Alokasi pengeluaran belanja daerah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan daya tarik daerah dengan peningkatan infrastruktur, perbaikan prasarana transportasi, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar dunia usaha daerah dapat lebih berkembang (Prabawati dan Wany, 2017). Kabupaten Bungo memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana

perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat (Mardiasmo, 2012).

Menurut Abdullah dan Halim (2013) dana perimbangan juga memiliki peran penting terhadap kemampuan belanja daerah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Belanja daerah di Kabupaten Bungo pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan yang tidak begitu besar yaitu hanya 0,72%, sedangkan dana perimbangan, PAD dan PDRB Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah di Kabupaten Bungo belum merata. Selanjutnya adanya peningkatan pendapatan asli daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerahnya.

METODE

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder bentuk *time series* selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan kurun waktu data tahun 2004-2019.

Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi atau badan resmi yang terkait seperti Kantor Badan Pusat Statistik serta beberapa literature yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo.

Metode analisis data

Untuk mengetahui perkembangan PAD, dana perimbangan, PDRB, jumlah penduduk, IPM dan belanja daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 digunakan rumus perkembangan sebagai berikut (Prabawati dan Wany, 2017) :

$$\text{Perkembangan PAD} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = Nilai variabel tahun terakhir

V_{t-1} = Nilai variabel tahun sebelumnya

Untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh secara simultan dan parsial dari Jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut (Amir dkk, 2019):

$$Y = \beta_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Q = Belanja daerah
 β_0 = konstanta
 b_1, \dots, b_5 = Koefisien regresi
 X_1 = Jumlah penduduk
 X_2 = PAD
 X_3 = Dana perimbangan
 X_4 = PDRB
 X_5 = IPM
 e = Standar eror

Uji F-statistik

Uji F-Statistik menunjukkan apakah semua bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji-F dapat dirumuskan n sebagai berikut:

$$F \text{ test} = \frac{R^2/(K-10)}{(1-R^2)/(n-K)}$$

Dimana :

- R = Koefisien determinasi
 K = Banyaknya variabel bebas
 N = Banyaknya jumlah observasi

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika Prob (F Statistik) < signifikan level 0,5 ($\alpha=5\%$), maka itu H_0 ditolak H_a diterima. Jika Prob (F Statistik) > signifikan level 0,5 ($\alpha=5\%$), maka itu H_0 diterima H_1 diterima.

Uji t-statistik

Uji statistik digunakan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan secara parsial. Bila signifikan berarti secara statistik ini menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tidak bebas. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut.

$$t = \frac{\beta_i - \beta}{S_b}$$

Dimana :

- β_1 = Koefisien variabel independen ke-i
 β = Nilai hipotesis
 s_b = simpangan baku

Dalam uji-t yang digunakan adalah satu arah, hipotesisi yang digunakan sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mempunyai kegunaan, yaitu sebagai ukuran ketepatan suatu garis yang diterapkan pada suatu kelompok data hasil observasi (*a measure of the goodness of fit*). Makin besar nilai R^2 maka semakin tepat atau cocok garis regresi, dan sebaliknya apabila nilai R^2 semakin kecil, maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi. Nilai R^2 antara 0 dan 1. R^2 juga digunakan untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan tidak bebas, digunakan rumus

$$R^2 = \frac{1 - \sum ei}{\sum ei}$$

Dimana apabila koefisien determinasi :

$R^2 = 1$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah sempurna dan positif

$R^2 = 0$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas mendekati nol, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah lemah sekali

$R^2 = -1$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan tidak bebas adalah negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Perkembangan PAD Kabupaten Bungo**

Perkembangan PAD Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan PAD Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2004	20.281.712	-
2005	22.244.318	9,68
2006	24.506.187	10,17
2007	37.890.791	54,62
2008	64.573.143	70,42
2009	59.006.321	-8,62
2010	46.664.510	-20,92
2011	61.175.415	31,10
2012	64.281.003	5,08
2013	80.201.122	24,77
2014	100.637.770	25,48
2015	107.128.087	6,45
2016	130.637.770	21,95
2017	114.818.208	-12,11
2018	183.133.679	59,50
2019	133.848.451	-26,91
Rata-Rata	78.189.280,	16,71

Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2019 (diolah)

Tabel 1. menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2019 rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bungo adalah Rp.78.189.280 dengan rata-rata perkembangan sebesar 16,71%. Naik turunnya PAD suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal,

diantaranya adalah kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relative rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan kualitas SDM aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan program serta ketidaktimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Perkembangan PAD Kabupaten Bungo

Adapun perkembangan dana perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019

Tahun	Dana Perimbangan (Ribu Rp)	Perkembangan (%)
2004	188.728.380	-
2005	223.508.999	18,43
2006	287.009.189	28,41
2007	351.297.654	22,40
2008	414.953.971	18,12
2009	435.291.642	4,90
2010	473.509.789	8,78
2011	529.100.111	11,74
2012	620.450.179	17,27
2013	714.327.809	15,13
2014	750.931.280	5,12
2015	768.951.280	2,40
2016	908.141.477	18,10
2017	812.254.037	-10,56
2018	909.063.378	11,92
2019	870.897.135	-4,20
Rata-Rata	578.651.019	11,20

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 2. menunjukkan bahwa rata-rata dana perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar Rp.578.651.019 dengan rata-rata perkembangan sebesar 11,20%. Dana perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan peningkatan dana ke daerah-daerah di wilayah Indonesia mengalami peningkatan dan mekanisme pencairannya yang semakin efektif. Kondisi ini dikarenakan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah dan dana pusat yang mengalir ke daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perkembangan PDRB Kabupaten Bungo

Selama tahun 2004-2019 rata-rata PDRB Kabupaten Bungo sebesar Rp.10.781,93 dengan rata-rata perkembangan sebesar 4,79%. Adapun perkembangan PDRB di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Perkembangan (%)
2004	6.599,00	-

2005	6.758,00	2,35
2006	7.015,00	3,66
2007	7.320,00	4,17
2008	7.704,00	4,98
2009	8.208,00	6,14
2010	8.983,00	8,63
2011	9.208,00	2,44
2012	9.630,00	4,38
2013	10.676,00	4,80
2014	11.809,00	4,59
2015	12.986,00	4,97
2016	14.371,00	4,64
2017	16.023,00	5,31
2018	17.303,25	7,40
2019	17.917,63	3,43
Rata-Rata	10.781,93	4,79

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan BPS Kabupaten Bungo (2019)

PDRB yang terus meningkat tentu memberikan keuntungan bagi Kabupaten Bungo, karena PDRB yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Bungo dalam keadaan baik. Selain itu, peningkatan PDRB di Kabupaten Bungo juga menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Bungo sudah berjalan dengan baik.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini

Tabel 4. Perkembangan penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2004	246.968	-
2005	242.355	-1,87
2006	250.934	3,54
2007	257.087	2,45
2008	264.389	2,84
2009	271.565	2,71
2010	304.833	12,25
2011	312.695	2,58
2012	320.627	2,54
2013	328.375	2,42
2014	336.320	2,42
2015	344.100	2,31
2016	351.878	2,26
2017	359.590	2,19
2018	367.182	2,11
2019	374.337	1,95
Rata-Rata	308.327	2,85

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 4. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 adalah 308.327 jiwa dengan rata-rata perkembangan sebesar 2,85%. Jumlah penduduk di Kabupaten Bungo mengalami perkembangan yang terus

meningkat, meskipun peningkatannya cenderung stabil. Jumlah penduduk di Kabupaten Bungo yang terus meningkat diduga karena tingginya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh peningkatan perkembangan dalam bidang kesehatan medis.

Perkembangan IPM Kabupaten Bungo

Adapun perkembangan IPM Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perkembangan IPM Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019

Tahun	IPM (%)	Perkembangan (%)
2004	68,00	-
2005	68,80	1,18
2006	69,50	1,02
2007	70,00	0,72
2008	70,67	0,96
2009	71,34	0,95
2010	66,28	-7,09
2011	66,70	0,63
2012	67,20	0,75
2013	67,54	0,51
2014	67,93	0,58
2015	68,34	0,60
2016	68,77	0,63
2017	69,04	0,39
2018	69,42	0,55
2019	69,86	0,63
Rata-Rata	68,71	0,20

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2019)

Rata-rata IPM di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar 68,71% dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,20%. IPM di Kabupaten Bungo setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang meningkat. Peningkatan IPM di Kabupaten Bungo ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bungo dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bungo

Berdasarkan Tabel 6. Menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar Rp.811.427.778 dengan rata-rata perkembangan sebesar 14,50%. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu

periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Adapun perkembangan belanja daerah di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebagai berikut.

Tabel 6. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019

Tahun	Belanja Daerah (Ribu Rp)	Perkembangan (%)
2004	210.895.003	-
2005	232.332.699	10,17
2006	326.360.078	40,47
2007	563.432.028	72,64
2008	680.186.956	20,72
2009	622.100.727	-8,54
2010	674.259.918	8,38
2011	744.999.647	10,49
2012	833.136.949	11,83
2013	1.051.265.834	26,18
2014	1.030.543.849	-1,97
2015	1.094.777.965	6,23
2016	1.089.477.250	-0,48
2017	1.190.415.102	9,26
2018	1.300.672.948	9,26
2019	1.337.987.498	2,87
Rata-Rata	811.427.778	14.50

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo (2019)

Pengaruh PAD, dana perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019

Hasil estimasi regresi linear berganda

Untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dilakukan analisis regresi linear berganda dengan hasil Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7, maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 12,97030 - 0,671102X_1 + 0,131417X_2 + 1,578422X_3 - 0,263204X_4 - 5,704654X_5$$

Uji statistik

Uji simultan (uji F)

Berdasarkan hasil regresi simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 156,6172 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 3,33 pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan ($df = n - k$) sebesar 10. Hal ini menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $156,6172 > 3,33$ yang artinya PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

Tabel 7. Hasil regresi linear berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.97030	4.293789	3.020711	0.0129
JML Penduduk (X1)	-0.671102	0.246718	-2.720119	0.0216
PAD (X2)	0.131417	0.152502	0.861738	0.4090
Dana Perimbangan (X3)	1.578422	0.233589	6.757270	0.0000
PDRB (X4)	-0.263204	0.068824	-3.824311	0.0033
IPM (X5)	-5.704654	2.082162	-2.739774	0.0208
R-squared	0.987391	Mean dependent var		11.85125
Adjusted R-squared	0.981087	S.D. dependent var		0.254581
S.E. of regression	0.035012	Akaike info criterion		-3.586278
Sum squared resid	0.012258	Schwarz criterion		-3.296557
Log likelihood	34.69022	Hannan-Quinn criter.		-3.571442
F-statistic	156.6172	Durbin-Watson stat		1.999731
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah, 2020

Uji parsial (uji t)

Jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0216 ($P < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,4090 ($P > 0,05$) sehingga H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

Dana perimbangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 ($P < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

PDRB memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0033 ($P < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

IPM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0208 ($P < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya IPM berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

Koefisien determinasi (R^2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R^2 dalam penelitian ini sebesar 0,987391. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,7391% belanja daerah di Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM. Sedangkan 1,2609% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di amati dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar 16,71%, dana perimbangan sebesar 11,20%, PDRB sebesar 42,43%, jumlah penduduk sebesar 2,85%, IPM sebesar 0,205 dan Belanja Daerah sebesar 14,50%.

Jumlah penduduk, dana perimbangan, jumlah penduduk dan IPM berpengaruh secara nyata terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019,

sedangkan PAD berpengaruh tidak nyata terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bungo untuk dapat memanfaatkan dan mengalokasikan pendapatan daerah untuk melakukan belanja daerah guna memberikan sarana dan prasarana layanan publik agar kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo dapat tercapai.

Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai belanja daerah diharapkan menggunakan faktor-faktor lain sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A. Halim. (2013). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah (studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IV*, Yogyakarta.
- D Chandra, S Hidayat, R Rosmeli.(2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12 (2), 67-76
- F Azzahra, PH Prihanto, YV Amzar. (2016). Analisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi, *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5 (2)
- Fasholla, R.T. (2017). Pengaruh belanja daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan asli daerah terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2011–2016. *Jurnal Ekonomi*. 3 (1) : 1-19
- Ferdiansyah, I., D.R. Deviyanti dan S. Pattisahusiwa. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. 14 (1) : 44-52.
- Gorahe, I.A.M., V. Masinambow dan D. Engka. (2011). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi*, 1 (3) : 1-12.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kartika, T dan I.A. Wantara. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dan kemungkinan terjadinya *flypaper effect* di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2 (2) : 1-10.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Ningrum, W.K. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015 (studi kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- S Sunargo, D Hastuti. (2019). Mengatasi perilaku kerja kontraproduktif melalui peran integratif politik organisasional dan kecerdasan emosional pada era revolusi industri 4.0, *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 45-54
- Sanusi, A dan M. Yusuf. (2018). Pengaruh PAD, PDRB, jumlah penduduk, IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah di Sumatera Utara tahun 2013-2015 pendekatan panel regression. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 3 (1) : 50-56